Efektivitas dan Kontribusi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap APBD Kabupaten Lamongan

Firistya Sabrina Rizqi

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: fristya.21050@mhs.unesa.ac.id

Nurul Hanifa

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: nurulhanifah@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan yang sering tidak mencapai target, tingginya ketergantungan pada Dana Perimbangan, serta dampak pandemi terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas PAD dan Dana Perimbangan dalam pelaksanaan APBD, serta menganalisis besarnya kontribusi keduanya terhadap total APBD Kabupaten Lamongan. Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Laporan Realisasi APBD periode 2019-2023, hasil penelitian menunjukkan efektivitas PAD mencapai rata-rata 103,91% (sangat efektif) dan Dana Perimbangan sebesar 96,95% (efektif). Namun, kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah dengan rata-rata 16,63%, sementara Dana Perimbangan berkontribusi signifikan sebesar 55,72%. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kemandirian fiskal daerah meski tingkat efektivitas pengelolaan keuangan sudah baik..

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, APBD, Efektivitas, Kontribusi.

Abstract

This research is motivated by fluctuations in Lamongan Regency's Original Regional Income (PAD), which often does not reach targets, high dependence on Balancing Funds, and the impact of the pandemic on the regional economy. This research aims to determine the level of effectiveness of PAD and Balancing Funds in implementing the APBD, as well as analyzing the magnitude of their contribution to the total APBD of Lamongan Regency. Using quantitative descriptive methods with secondary data from the APBD Realization Report for the 2019-2023 period, the research results show that the effectiveness of PAD reached an average of 103.91% (very effective) and the Balancing Fund was 96.95% (effective). However, PAD's contribution to the APBD is still low with an average of 16.63%, while the Balancing Fund contributes significantly at 55.72%. This condition indicates the need to increase regional fiscal independence even though the level of effectiveness of financial management is already good.

Keywords: Original Regional Income (PAD), Balancing Fund, APBD, Effectiveness, Contribution.

How to cite: Rizqi, F. S. & Hanifa, Nurul (2025). Efektivitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Lamongan . *Independent : Journal Of Economics*, 5(1), 69-78

PENDAHULUAN

Sistem sentralisasi beralih ke desentralisasi pada sistem pemerintahan di Indonesia yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah telah membawa perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi landasan yuridis bagi daerah dalam mengembangkan potensi lokal dan mengelola sumber daya daerah secara mandiri. Otonomi daerah pada hakikatnya merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengelola internalnya sendiri tetapi mereka tetap terbatas oleh undang-undang dan kebijakan nasional. Pemerintah pusat memegang kendali penuh atas jalannya pemerintahan, sementara wilayah-wilayah administratif di bawahnya, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, hanya memiliki kewenangan yang didelegasikan oleh pusat (Syam & Zulfikar, 2022).

Implementasi otonomi daerah juga ditujukan untuk mendorong terealisasinya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pendayagunaan, dan keikutsertaan rakyat. Melalui adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kebijakan yang selaras dengan ciri khas dan kepentingan daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat memperpendek rentang kendali layanan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah yang berbasis pada potensi dan kearifan lokal. Otonomi daerah tidak hanya mencakup aspek politik dan administratif, tetapi juga aspek fiskal yang tercermin dalam konsep desentralisasi fiskal. Kewenangan pemerintah daerah melalui konsep desentralisasi fiskal berupa pengelolaan sumber pendanaan daerah secara independen, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kapasitas dalam mengendalikan finansial daerah secara optimal, efisien, dapat dipertanggungjawabkan, dan kredibel. Keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh potensi wilayah dalam mengeksplorasi peluang sumber-sumber penerimaan daerah dan mengelola belanja daerah untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan.

Pengendalian keuangan dicerminkan dalam APBD, seperti kapabilitas pemerintah dalam memaksimalkan pemasukan lokal dan mendanai pengeluaran lokal dalam pengembangan daerah dan manfaat sosial. (Hastuti & Nasution, 2024). APBD terbentuk dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (W. Adawiyah & Kusuma, 2015). Terdapat perubahan format APBD, dimana pendapatan terbagi menjadi tiga klasifikasi, diantaranya pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah (Halim, 2007). Dalam komponen pendapatan terdapat sumber yang menyumbang utama diantaranya adalah pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan (Suratmi & Nur, 2023). APBD tidak hanya menunjukkan kapasitas fiskal suatu daerah, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu merencanakan, mendistribusikan, dan mengelola aset guna meraih

sasaran pembangunan yang telah diputuskan. Keberhasilan dalam pengelolaan APBD ditunjukkan dengan pemerintah daerah mampu mendayagunakan seluruh aset dan potensi, baik dari keanekaragaman alam yang dimiliki, sumber daya manusia, maupun infrastruktur, untuk memastikan tercapainya pemerataan dan keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan di seluruh wilayahnya.

Kabupaten Lamongan terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.812,80 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.385.835 jiwa (BPS). Dari segi PDRB, Kabupaten Lamongan berada pada peringkat menengah di antara kabupaten/kota di Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan jasa yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Dari segi PAD, realisasinya menunjukkan pencapaian target anggaran yang cukup baik, namun jika dibandingkan dengan struktur pendapatan daerah secara keseluruhan, Realisasi dana perimbangan Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 hingga 2023 tetap mendominasi struktur pendapatan daerah dengan porsi lebih dari 50% dari total pendapatan daerah.

Berdasarkan peran vital PAD dan dana perimbangan dalam APBD, PAD mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mengelola sumber daya lokal, sedangkan dana perimbangan merupakan instrumen untuk meminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah. Namun, di banyak daerah termasuk Kabupaten Lamongan, terdapat ketidakseimbangan dalam komposisi PAD dan dana perimbangan yang mengarah pada ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah dapat menjalankan kegiatan analisis kinerja pemerintah daerah dengan pengelolaan keuangan daerah bisa menggunakan salah satu alat ukur yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sebelumnya, yaitu berupa analisis rasio pada APBD. Selanjutnya, temuan atas hasil analisis tersebut bisa digunakan sebagai standar pengukuran kontribusi setiap sumber pendapatan daerah dalam pembentukan pendapatan daerah dan mengukur efektivitas untuk merealisasikan pendapatan daerah (W. Adawiyah & Kusuma, 2015).

Penelitian sebelumnya oleh W. Adawiyah & Kusuma, (2015) menyatakan bahwa kontribusi PAD berada dititik kurang efektif, dan kontribusi dana perimbangan, efektifitas PAD serta dana perimbangan berada dititik efektif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa keuangan daerah masih bergantung pada pemerintahan pusat. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Sahrudin & Yasin, (2022) dapat diartikan, kontribusi PAD berada pada titik efektif, dimana pemerintah pusat dalam keterlibatan berangsur menurun. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dianggap semakin mampu menyelenggarakan otonomi dengan baik. kondisi didukung oleh kinerja keuangan yang semakin membaik, menggambarkan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola potensi dan pendapatan secara lebih mandiri tanpa ketergantungan pada bantuan dari pusat.

Berdasarkan latar belakang yang telah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana efektivitas dan kontribusi PAD dan dana perimbangan terhadap APBD di Kabupaten Lamongan tahun 2019-2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menggunakan data sekunder yang didapatkan dari data publikasi statistik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten lamongan mulai dari tahun 2019-2023. Pada penelitian ini, teknik analisa data yang dipakai yaitu menggunakan analisis deskriptif dimana menggambarkan keadaan objek berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi, dan akhirnya melibatkan pengumpulan, analisis, dan penarikan kesimpulan data (Fakhrozi, 2018), menggunakan analisis rasio yang digunakan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PAD dan dana perimbangan Kabupaten lamongan.

Efektivitas menggambarkan ketercapaian hasil dalam manggapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, semakin besar hasil terhadap taret, maka suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat dikatakan semakin efektif (Sholikhah & Priyono, 2022). Untuk menghitung nilai efektifitas menggunakan rumus:

$$Efektifitas = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

$$Efektifitas = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan}}{\text{Target Dana Perimbangan}} \times 100\% \quad (2)$$

Untuk mengetahui kemampuan efektivitas PAD dan Dana Perimbangan pada APBD yang memiliki lima kriteria (Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327), yaitu:

Tidak Efektif	< 60
Kurang Efektif	60-80
Cukup Efektif	80-90
Efektif	90-100
Sangat Efektif	>100

Melakukan analisis kontribusi PAD dan Dana Perimbangan berdasarkan perhitungan sebelumnya. Dalam menghitung nilai kontribusi menggunakan rumus:

$$Kontribusi = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{APBD}} \times 100\% \quad (3)$$

$$Kontribusi = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{APBD}} \times 100\% \quad (4)$$

Untuk melakukan penilaian kontribusi PAD dan Dana Perimbangan pada APBD yang memiliki enam kriteria atas rasio kontribusi, yaitu:

Sangat Kurang	0-10
Kurang	10-20

Cukup	20-30
Sedang	30-40
Baik	40-50
Sangat Baik	>50

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data target serta realisasi dari PAD dan dana perimbangan Kabupaten Lamongan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Target serta Realisasi Dari PAD Dan Dana Perimbangan Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Tahun	PAD		Dana Perimbangan	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	517,168,711,905	472,002,823,163	1,745,045,984,881	1,669,265,105,739
2020	483,583,044,116	481,752,331,399	1,563,812,173,054	1,542,723,757,256
2021	477,998,311,040	604,587,635,067	1,644,332,264,396	1,637,147,692,887
2022	523,035,537,324	507,680,928,067	1,796,044,263,000	1,742,176,617,653
2023	517,595,790,500	528,609,550,761	2,034,879,245,800	1,910,562,329,933

Sumber: BPKAD Kabupaten Lamongan, 2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan periode 2019-2023 menunjukkan pencapaian tertinggi pada tahun 2021 dengan Rp 604,58 miliar, didorong oleh pemulihan sektor usaha pasca-pandemi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan. Pencapaian terendah terjadi pada 2019 dengan Rp 472,00 miliar (91,29% dari target) akibat sistem pemungutan pajak belum terintegrasi dan kurangnya intensifikasi sumber PAD. Tahun 2020 realisasi meningkat menjadi Rp 481,75 miliar meskipun dalam situasi pandemi berkat penyesuaian target yang realistis. Tahun 2022 terjadi penurunan dengan realisasi Rp 507,68 miliar, namun 2023 kembali positif dengan Rp 528,60 miliar didorong oleh konsolidasi sistem perpajakan. Sementara itu, realisasi Dana Perimbangan tertinggi pada 2023 dengan Rp 1,91 triliun (93,88% dari target), terendah pada 2020 dengan Rp 1,54 triliun akibat refocusing anggaran untuk penanganan pandemi. Tahun 2019 realisasi mencapai Rp 1,66 triliun (95,65%) dengan kendala keterlambatan pencairan transfer. Tahun 2021 menunjukkan pemulihan dengan realisasi Rp 1,63 triliun (99,56%), dan 2022 mencapai Rp 1,74 triliun (96,99%) mencerminkan tren positif pemulihan ekonomi.

Efektivitas PAD terhadap APBD Kabupaten Lamongan

Tabel 1.2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2019	91,27	Efektif
2020	99,62	Efektif
2021	126,48	Sangat Efektif
2022	97,06	Efektif
2023	102,13	Sangat Efektif
Rata-rata	103,31	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Dapat dilihat pada tabel 1.2, fluktuasi PAD Kabupaten Lamongan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh sejumlah kondisi. Pada tahun 2019, efektivitas PAD tercatat sebesar 91,27% (kategori efektif), menunjukkan kinerja yang stabil meskipun belum mencapai target. Peningkatan pada tahun 2020 menjadi 99,62% (kategori efektif) mencerminkan keberhasilan adaptasi pemerintah daerah terhadap tantangan awal pandemi COVID-19 melalui implementasi strategi peningkatan kesadaran masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, serta pemberian insentif pajak dan relaksasi bagi pelaku usaha yang terdampak sesuai Peraturan Bupati No. 188/171/KEP/413.013/2020. Lonjakan signifikan pada tahun 2021 hingga mencapai 126,48% (kategori sangat efektif) menunjukkan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekspansi sumber PAD dalam konteks pemulihan ekonomi. Penurunan pada tahun 2022 menjadi 97,06% (kategori efektif) disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal pasca pandemi, kendala beberapa sektor dalam memenuhi target penerimaan, dan peningkatan target anggaran PAD menjadi Rp523 miliar yang membuat pencapaian target menjadi lebih menantang, meskipun realisasi PAD sebesar Rp507 miliar tetap menunjukkan kinerja yang baik. Pada tahun 2023, efektivitas PAD kembali meningkat hingga 102,13% (kategori sangat efektif), menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menetapkan target yang realistis dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Lamongan

Tabel 1.3 Efektivitas Dana Perimbangan

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2019	95,66	Efektif
2020	98,65	Efektif
2021	99,56	Efektif
2022	97,00	Efektif
2023	93,89	Efektif
Rata-rata	96,95	Efektif

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Dapat dilihat pada tabel 1.3, Fluktuasi Efektivitas Dana Perimbangan Kabupaten Lamongan menunjukkan tren yang relatif stabil dalam kategori efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 96,95% selama periode penelitian. Pada

tahun 2019, efektivitas Dana Perimbangan tercatat sebesar 95,66% (kategori efektif), kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 menjadi 98,65%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 99,56%, yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Peningkatan tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat untuk menopang penyembuhan perekonomian dari pandemi COVID-19, termasuk realokasi dan optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk prioritas nasional seperti kesehatan dan pendidikan. Namun pada tahun 2022, efektivitas Dana Perimbangan mengalami penurunan menjadi 97,00%, diikuti oleh penurunan lebih lanjut pada tahun 2023 sebesar 93,89%. Meskipun mengalami penurunan, kedua angka tersebut tetap masuk dalam kategori efektif. Kemerosotan ini dipicu oleh beberapa penyebab seperti berkurangnya alokasi Dana Perimbangan akibat penyesuaian anggaran pusat pascapandemi atau adanya keterlambatan dalam penyaluran dana. Efektivitas Dana Perimbangan yang masih dalam kategori efektif menunjukkan bahwa secara umum dana ini mampu mendukung pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan dan mencerminkan peran penting transfer fiskal dari pemerintah pusat dalam mendukung stabilitas keuangan daerah.

Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lamongan

Tabel 1.4 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria
2019	16,24	Kurang
2020	16,76	Kurang
2021	19,98	Kurang
2022	15,57	Kurang
2023	16,59	Kurang
Rata-rata	16,63	Kurang

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Dapat dilihat pada tabel 1.4, fluktuasi Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Lamongan selama periode 2019-2023 menunjukkan rata-rata sebesar 16,63% yang tergolong dalam kategori kurang. Meskipun kontribusi PAD sempat mengalami kenaikan, terutama pada tahun 2021 yang mencapai 19,98% sebagai kontribusi tertinggi dalam lima tahun terakhir, angka tersebut tetap berada dalam kategori kurang. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2022, diikuti oleh sedikit peningkatan pada tahun 2023, namun kontribusi PAD tetap berada dalam kategori rendah selama periode penelitian. Kontribusi PAD yang rendah ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, belum optimalnya sanksi yang dikenakan pemerintah daerah jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak, serta masih rendahnya jumlah wajib pajak daerah di Kabupaten Lamongan. Peningkatan kontribusi PAD pada tahun 2021 hingga mencapai 19,98% mengindikasikan bahwa pemaksimalan PAD oleh pemerintah daerah tengah diupayakan melalui intensifikasi dan ekspansi pajak, serta meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi. Sementara itu, penurunan pada

tahun 2022 ditimbulkan oleh adanya efek lanjutan dari pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi, termasuk tutupnya banyak tempat hiburan tanpa pemberitahuan resmi sehingga tidak tercatat sebagai wajib pajak aktif, yang mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan pajak hiburan. Kontribusi PAD yang masih rendah ini mencerminkan bahwa meskipun PAD telah memberikan tambahan pendapatan daerah, namun perannya belum dapat menjadi penopang utama struktur APBD Kabupaten Lamongan.

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Lamongan

Tabel 1.5 Kontribusi Dana Perimbangan

Tahun	Rasio Kontribusi (%)	Kriteria
2019	57,45	Sangat Baik
2020	53,67	Sangat Baik
2021	54,10	Sangat Baik
2022	53,41	Sangat Baik
2023	59,97	Sangat Baik
Rata-rata	55,72	Sangat Baik

Sumber: Data diolah penulis (2024)

Dapat dilihat pada tabel 1.5, Fluktuasi Kontribusi Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Lamongan selama periode 2019-2023 menunjukkan dominasi yang cukup besar dengan rata-rata kontribusi sebesar 55,72% yang masuk dalam kategori sangat baik. Meskipun mengalami fluktuasi, kontribusi Dana Perimbangan tetap dominan dengan nilai terendah 53,41% pada 2022 dan tertinggi 59,97% pada 2023. Penurunan kontribusi pada tahun 2020 dan 2022 disebabkan oleh adanya perubahan alokasi DAU atau DAK yang terkena dampak oleh prioritas nasional, termasuk upaya pemerintah pusat untuk mendistribusikan anggaran secara lebih adil antar bidang lainnya. Sementara itu, peningkatan kontribusi pada tahun 2023 dapat mencerminkan adanya peningkatan alokasi Dana Perimbangan oleh pemerintah pusat atau keberhasilan daerah dalam memenuhi kriteria alokasi tertentu, sebagaimana dijelaskan Purwaningsih, (2021) mengenai fleksibilitas penggunaan DAU. Kontribusi Dana Perimbangan yang tinggi di Kabupaten Lamongan menunjukkan tantangan dalam meningkatkan PAD. Kontribusi Dana Perimbangan yang masih dominan ini mencerminkan bahwa Dana Perimbangan merupakan komponen pendukung utama struktur keuangan daerah, dan menunjukkan bahwa keuangan Kabupaten Lamongan masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan dan operasional daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Efektivitas PAD terhadap APBD Kabupaten Lamongan pada tahun 2019-2023 secara rata-rata sebesar 103,91% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas dana perimbangan terhadap APBD Kabupaten Lamongan pada

tahun 2019-2023 rata-rata sebesar 96,95%, yang termasuk dalam kategori efektif. Kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah yaitu rata-rata sebesar 16,63% yang termasuk dalam kategori kurang. Di sisi lain, dana perimbangan memiliki kontribusi dengan rata-rata sebesar 55,72% yang tergolong dalam kategori sangat baik terhadap APBD.

Bagi pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, modernisasi sistem pemungutan pajak berbasis teknologi, dan pengembangan aset daerah yang lebih produktif. Diversifikasi sumber pendapatan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata juga diperlukan. Terkait dana perimbangan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat sistem monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat. Penguatan tata kelola dan transparansi keuangan daerah juga penting. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel atau membuat perbandingan dengan kabupaten lain, melakukan analisis longitudinal dalam jangka waktu lebih panjang, menambahkan metode penelitian kualitatif, dan mengevaluasi program-program pemerintah daerah terkait peningkatan PAD dan penggunaan dana kompensasi.

REFERENSI

- Fakhrozi, L. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/12345678/233>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Hastuti, N. S., & Nasution, D. A. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 24 No, 157–170*.
- Purwaningsih. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*.
- Sahrudin, & Yasin, H. (2022). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Rangka Mengukur Tingkat Kemandirian Daerah di Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Komponen PAD Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekonomi Akutansi Dan Manajemen, 2(2), 279–295*. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Suratmi, & Nur, M. A. (2023). *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020. 6(2), 1–14*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal*

Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(2), 98–114.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>

- W. Adawiyah, & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *AKUNIDA ISSN 2442-3033*, 1.